

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Peraturan Sekolah

1. Pengertian sekolah

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni).

Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas. Namun saat ini kata sekolah telah berubah arti menjadi suatu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain.

Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya.¹

Menurut kamus besar bahasa indonesia, sekolah berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.² Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar yang menjadi tumpuan harapan orang tua, masyarakat dan pemerintah karena sekolah memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan afektif (nilai dan sikap) bagi peserta didik.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan berbagai proses. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib, teratur, dan sistematis sehingga usaha untuk menghasilkan manusia terdidik dan terampil yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kemajuan suatu institusi. Sekolah

¹Lihat di <http://edukasimedia.wordpress.com/2011/07/15/definisi-sekolah>. Diakses pada tanggal 20 mei 2013 pukul 06:10.

²*Kamus besar bahasa indonesia v1.1*

bukan hanya sekedar tempat mencari ijazah. Sekolah bukan hanya sekedar tempat mencari nilai.

Sekolah adalah tempat untuk belajar. Belajar mengenai berbagai mata pelajaran, belajar mengenai kehidupan sosial, dan belajar mengenai hidup. Sekolah adalah tempat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan baru. Sekolah harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan tenaga kependidikan yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.³

2. Pengertian peraturan sekolah

Peraturan adalah suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut. Peraturan juga berguna bagi perkembangan mental dan psikologis bagi yang menaatinya. Menumbuhkan rasa hormat serta pembentukan pribadi yang baik. Peraturan sekolah adalah peraturan yang diterapkan oleh sekolah tertentu dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muda yang sering bersikap kurang kondusif dalam menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah. Banyak orang beranggapan bagaimana seharusnya peraturan itu dibuat dan bagaimana isi dari peraturan tersebut. Kita ambil

³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.11, h.54.

contoh sebuah peraturan di sekolah. Setiap sekolah memiliki aturannya sendiri dan mereka yang membuatnya sendiri.⁴

Karakteristik tata tertib dan disiplin sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar. Pada dasarnya tata tertib dan disiplin merupakan harapan yang dinyatakan secara eksplisit yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku peserta didik yang dapat diterima, prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya. Ada dua dimensi penting dari disiplin yaitu: persetujuan kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah dan dukungan yang diberikan kepada guru dalam menegakkan disiplin sekolah. Indikator karakteristik ini adalah:

- a. Terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peserta didik yang bisa diterima.
- b. Penyusunan tata tertib melibatkan aspirasi peserta didik.
- c. Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
- d. Pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran dan keterlambatan yang dilakukan peserta didik.
- e. Tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai cara.

⁴Lihat di <http://8mei.wordpress.com/tag/penerapan-aturan-sekolah>.diakses pada tanggal 21 mei 2013 pukul: 20:20.

- f. Orang tua peserta didik memberikan dukungan kepada sekolah mengenai kebijakan disiplin sekolah
- g. Penjatuhan hukuman hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai maksud dan alasan positif dari pengambilan tindakan tersebut.
- h. Peserta didik memperlakukan guru dan peserta didik dengan saling menghargai.
- i. Ada konsistensi diantara para guru mengenai prosedur disiplin bagi peserta didik.
- j. Guru memiliki standar tertulis tentang perilaku peserta didik yang dipatuhi secara konsisten di dalam kelas.⁵

Rendahnya produktivitas tenaga kependidikan di sekolah baik dalam mengikuti aturan dan tata tertib sekolah, maupun dalam melakukan pekerjaannya sangat erat kaitannya dengan masalah disiplin. Oleh karena itu, dalam paradigma baru manajemen pendidikan di sekolah perlu adanya peningkatan disiplin untuk menciptakan iklim sekolah yang lebih kondusif dan dapat memotivasi kerja, serta menciptakan budaya kerja dan budaya disiplin para tenaga kependidikan dalam melakukannya di sekolah.

Sekolah membuat aturan-aturan yang harus ditaati khususnya oleh warga sekolah, guru, peserta didik, karyawan dan kepala sekolah. Aturan tersebut meliputi tata tertib waktu masuk dan pulang sekolah, kehadiran di

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), Cet.2, h.79-80.

sekolah dan di kelas seta proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan tata tertib lainnya. Dengan meningkatnya disiplin, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas jam belajar sesuai dengan waktu yan telah ditetapkan dan meningkatkan iklim belajar yang lebih kondusif untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan mencapai hasil belajar peserta didik yang lebih baik.⁶

3. Manajemen sekolah

Kita sering mendengar bahwa banyak sekolah sekolah unggulan atau menjadi unggul karena manajemen sekolahnya bagus. Manajemen sekolah sebagai bagian tugas dari manajemen pendidikan, memiliki beberapa bidang garap. Secara ringkas, bidang garapan manajemen pendidikan sebagai aspek statis dalam manajemen sekolah yang meliputi: manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan dan manajemen komunikasi dengan masyarakat atau humas.

Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan aneka kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Penataan ini dimulai sejak masuk pertama kali sampai peserta didik yang bersangkutan keluar atau lulus dari sebuah sekolah termasuk pembentukan peraturan sekolah bagi peserta didik. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa manajemen peserta didik

⁶ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala, Ibid.* h.80-81.

merupakan kegiatan pencatatan peserta didik , mulai dari proses penerimaan hingga peserta didik tersebut lulus dari sekolah bersangkutan disebabkan karena sudah purna belajar atau sebab lain.

Manajemen peserta didik secara umum dibagi dalam empat kegiatan penting yaitu: penerimaan peserta didik, ketatausahaan peserta didik, pencatatan bimbingan dan penyuluhan dan pencatatan prestasi belajar.⁷ Sekolah juga diharuskan mempunyai catatan tata tertib, yaitu catatan atau peraturan yang bukan hanya diperlukan bagi peserta didik saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan. Tata tertib ini secara singkat memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. aturan-aturan yang bersifat fisik/lahiriah seperti kebersihan baadan, pakaian, dan alat-alat pelajaran.
- b. aturan-aturan tingkah laku seperti sikap terhadap guru, kepala sekolah, karyawan tata usaha dan sebaagainya.
- c. Aturan-aturan ketertiban seperti kehadiran dalam pembelajaran, model pembelajaran dan sebagainya.

Dibutuhkan pengorganisasian yang baik dalam menjalankan semua peraturan sekolah. Karena jika sudah teroganisasi dengan baik maka pelaksanaannya pun juga akan baik.

⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2008), h.57.

Pengorganisasian memiliki tiga elemen penting yang menonjol yaitu : komitmen manajemen puncak terhadap manajemen sumberdaya yang ada, departemen sumberdaya yang tangguh, dan administrasi lini staf yang terintegrasi dengan baik.⁸

Menurut Hadari Nawawi, pengorganisasian adalah sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembedaan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja.⁹

Disamping pengorganisasian diperlukan juga koordinasi antara satu pihak dengan yang lainnya berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi salah paham antara satu dengan yang lain. Koordinasi merupakan suatu proses mengintegrasikan, menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas secara terus menerus guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara menurut Suharsimi Arikunto, pengkoordinasian merupakan suatu usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur , menyatukan, mensekaskan, mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.¹⁰

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengatur, menyingkronisasi, mengintegrasikan semua kepentingan dan kegiatan yang

⁸Henry Simamora, *Manajeme Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004), h.25.

⁹Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*.(Jakarta : Gunung Agung, 2005), h.63.

¹⁰Agus wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013), h.59.

dilakukan oleh bawahan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini menjadi sangat penting dilakukan seorang pemimpin sebelum membentuk peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lain agar:

- a. Diperoleh kekuatan yang menyatukan gerak, sehingga dapat harmonis dan tercapai hasil secara efektif dan efisien.
- b. Tidak terdapat kesimpang-siuran kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Tidak terdapat konkurensi antar bagian dan sebaliknya terjalin hubungan yang baik dan saling membantu.

Seorang pemimpin dapat melakukan pengkoordinasian dengan berbagai cara, baik yang bentuknya langsung pada kegiatan melaksanakan tugas ataupun secara tidak langsung berupa koordinasi yang menunjang.¹¹

Selain itu, komunikasi menjadi faktor penting dalam menentukan sebuah kebijakan dan dalam mengatur segala aktifitas yang ada. Dengan adanya komunikasi yang baik tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa non verbal atau bahasa isyarat.¹²

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen, Ibid.* h.12.

¹²Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.420.

Dalam sebuah organisasi atau lembaga, komunikasi sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan guna kepentingan mencapai tujuan bersama tanpa adanya konflik internal maupun eksternal.

4. Fungsi peraturan sekolah

Peraturan mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk disiplin dan bermoral.

- a Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Misalnya, anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolah, bahwa menyerahkan tugas yang dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya.
- b Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Bila merupakan peraturan keluarga bahwa tidak seorang anak pun boleh mengambil mainan atau milik saudaranya dan izin sipemilik, anak segera belajar bahwa hal ini dianggap perilaku yang tidak diterima karena mereka dimarahi atau dihukum bila melakukan tindakan terlarang ini.

Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi penting diatas, peraturan itu harus dimengerti, diingat dan diterima oleh si anak. Bila

peraturan-peraturan diberikan dalam kata-kata yang tidak dimengerti atau hanya sebagian dimengerti, peraturan itu tidak berharga sebagai pedoman perilaku dan gagal mengekang perilaku yang tidak diinginkan.

Jika misalnya anak diberitahu untuk tidak mengambil mainan Albert tanpa izin Albert, anak-anak itu mungkin tidak mengerti bahwa peraturan ini berlaku bagi semua anak dalam keluarga atau kelompok sekolah, dan bukan bagi Albert saja. Atau anak itu tidak mengerti bahwa peraturan untuk tidak bermain di jalan berarti semua jalanan, bukan hanya jalan didepan rumah keluarganya. Bahkan jika anak-anak mengerti suatu peraturan, mereka mungkin tidak mengingatnya. Sebagai contoh, bila mereka diberitahu suatu peraturan sewaktu mereka sedang sibuk bermain, perhatian mereka tidak cukup besar untuk mengingatnya beberapa jam kemudian atau hari berikutnya.¹³

Pada saat pelaksanaan ujian nasional tahun 2013 misalnya, wakil wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, bahwa yang terpenting dari pelaksanaan UN tahun ini adalah bukan hanya kelengkapan lembar jawaban saja tetapi disiplin siswa juga perlu diperhatikan karena banyak siswa yang datang terlambat, keterlambatan ini akan sangat mempengaruhi mereka dalam mengerjakan ujian. Beliau juga menambahkan agar pengawasan ujian juga

¹³Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak (Child Development)*, terj., Med. Meitasari Tjandrasa, (Jakarta : Erlangga, 1978), h.85.

diperketat dan lebih memperhatikan kualitas guru yang mengawasi.¹⁴ Dengan kutipan tidak langsung tadi, dapat kita simpulkan bahwa peraturan sekolah sangat penting dalam mengawal semua kegiatan siswa. Rendahnya kedisiplinan mereka terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan mengganggu jalannya kegiatan.

5. Implementasi peraturan sekolah

Perlakuan kasar kepada anak dapat menyebabkan cedera bagi anak. Penganiayaan fisik ini berkaitan dengan hukuman fisik yang berlebihan. Akibatnya dapat menyebabkan anak cacat bahkan kematian, di samping itu akan mengganggu sikap emosional anak. Risikonya anak menjadi depresi, cemas, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan di sekolah.

Menurut Clemes¹⁵, ada beberapa pertanda yang menunjukkan bila hukuman dan disiplin sekolah mungkin tidak sesuai untuk diterapkan, sehingga anak sulit untuk mematuhi disiplin sekolah disebabkan oleh: Seorang anak yang mempunyai citra diri yang sangat buruk dan sangat dipengaruhi oleh kegagalannya sendiri pasti membutuhkan penghargaan.

¹⁴Lihat di <http://Harian Padang Expres>, edisi Selasa, 23/04/2013.

¹⁵Clemes, Harris, *Mengajarkan Disiplin Kepada Anak*, (Jakarta : Mitra Utama, 2001), Cet Ke-1, h.47.

Seorang anak yang takut mencoba hal-hal yang baru, takut menerima tantangan dan sulit melakukan kegiatan yang melelahkan mungkin akan lebih bersemangat bila diberikan penghargaan. Seorang anak yang sangat manja dan takut melakukan tugasnya sendirian perlu diberikan penghargaan jika dia ternyata mampu melaksanakan tugasnya tanpa bantuan orang lain.

Seorang anak yang merasa kecewa karena selalu dibandingkan dengan saudaranya yang lebih pintar, lebih rajin, lebih mandiri, dan lebih aktif, perlu diberikan penghargaan agar dia merasa mampu untuk berhasil.

Seorang anak yang sering memperlihatkan citra diri yang negatif atau perasaan takut yang berlebihan dengan mengatakan hal-hal seperti “Saya tidak dapat melakukannya,” dan “Saya selalu gagal,” “Saya tidak akan mampu melakukannya lagi,” adalah anak yang mungkin membutuhkan penghargaan. Seorang anak yang mengalami gangguan fisik, motorik, atau organik, dan karena kesulitan semacam itu sering mengalami kegagalan dibandingkan anak lainnya yang sebaya dengannya, perlu diberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhannya yang khas dan juga perlu diberikan penghargaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugasnya.

Di sekolah-sekolah yang tata tertibnya tidak konsisten biasanya akan terjadi berbagai macam masalah yang sangat menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara

konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Walaupun setiap sekolah telah mempunyai peraturan tersendiri bukanlah berarti sekolah tersebut tidak menemukan berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah kerap dilakukan oleh para siswa. Dalam Buku 4 Pedoman Tatakrama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial bagi SMP yang diterbitkan oleh Depdiknas disebutkan bahwa dunia pendidikan kita dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang amat kompleks yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu masalah tersebut adalah menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan etika moral dalam praktik kehidupan sekolah yang mengakibatkan sejumlah ekses negatif yang amat merisaukan masyarakat. Ekses tersebut antara lain semakin maraknya penyimpangan berbagai norma kehidupan agama dan sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam bentuk: kurang hormat kepada guru dan pegawai sekolah, kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan tata tertib serta peraturan sekolah, kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan, perkelahian antar pelajar, penggunaan obat terlarang, dan lain-lain.

Penerapan disiplin sekolah sangat bergantung pada tekniknya. Di bawah ini diuraikan tiga teknik penerapan disiplin sekolah yang tertuang

dalam bentuk peraturan sekolah, yakni “peraturan otoritarian, peraturan permisif, peraturan demokratis.”

a. Peraturan Otoritarian

Dalam peraturan otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin sekolah ini diminta mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu. Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, akan menerima sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya, bila berhasil memenuhi peraturan, kurang mendapat penghargaan atau hal itu sudah dianggap sebagai kewajiban. Jadi, tidak perlu mendapat penghargaan lagi. Disiplin sekolah yang otoritarian selalu berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan dorongan, tekanan, pemaksaan dari luar diri seseorang.

b. Peraturan Permisif

Dalam peraturan ini seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambalnya itu. Seseorang yang berbuat sesuatu, dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku, tidak diberi sanksi atau hukuman. Dampak teknik permisif ini berupa kebingungan dan kebingungan. Penyebabnya karena tidak tahu mana yang tidak dilarang dan mana yang dilarang atau

bahkan menjadi takut, cemas, dan dapat juga menjadi agresif serta liar tanpa kendali.

c. Peraturan Demokratis

Pendekatan peraturan demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Teknik ini menekankan aspek edukatif bukan aspek hukuman. Sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada yang menolak atau melanggar tata tertib. Akan tetapi, hukuman dimaksud sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan mendidik. Dalam disiplin sekolah yang demokratis, kemandirian dan tanggung jawab dapat berkembang. Siswa patuh dan taat karena didasari kesaadaran dirinya. Mengikuti peraturan yang ada bukan karena terpaksa, melainkan atas kesadaran bahwa hal itu baik dan ada manfaat.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada siswa atau warga sekolah lainnya yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan yang telah diatur oleh sekolah, yang secara eksplisit berbentuk larangan-larangan. Hal ini menurut Depdiknas Tahun 2001, “Sanksi yang diterapkan agar bersifat mendidik, tidak bersifat hukuman fisik, dan tidak menimbulkan trauma

psikologis.” Sanksi dapat diberikan secara bertahap dari yang paling ringan sampai yang seberat-beratnya. Sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sekolah yang ringan.
- b. Hukuman pemberian tugas yang sifatnya mendidik, misalnya membuat rangkuman buku tertentu, menterjemahkan tulisan berbahasa Inggris dan lain-lain.
- c. Melaporkan secara tertulis kepada orang tua siswa tentang pelanggaran yang dilakukan putera-puterinya.
- d. Memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang diperbuatnya.
- e. Melakukan skorsing kepada siswa apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran peraturan sekolah berkali-kali dan cukup berat.
- f. Mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah, misalnya yang bersangkutan tersangkut perkara pidana dan perdata yang dibuktikan oleh pengadilan.

Pemberian hukuman tidak ada bedanya dengan pemberian penghargaan. Antara pemberian hukuman dan penghargaan merupakan respons seseorang kepada orang lain karena perbuatannya. Bedanya, pemberian penghargaan termasuk respons positif, sedangkan pemberian

hukuman termasuk respons negatif. Akan tetapi, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengubah tingkah laku seseorang. Adapun respons positif bertujuan agar tingkah laku yang sudah baik akan lebih bertambah frekuensinya sehingga akan lebih baik lagi di masa mendatang. Sedangkan respons negatif (hukuman) bertujuan agar seseorang yang memiliki tingkah laku yang tidak baik itu dapat berubah dan lambat laun akan mengurangi frekuensi negatifnya.

Tegaknya peraturan sekolah secara konsisten merupakan faktor pertama dan utama yang dapat menunjang berlangsungnya proses belajar yang baik. Baik buruknya lingkungan sekolah sebenarnya sangat ditentukan oleh peraturan atau tata tertib yang dilaksanakan secara konsisten. Hanya di sekolah dengan peraturan yang konsistenlah proses belajar dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Dengan adanya peraturan tersebut, sekolah dapat berfungsi sebagai arena persaingan yang sehat bagi para siswa untuk meraih prestasi yang semaksimal mungkin. Selain itu, yang paling penting, dengan adanya peraturan yang dijalankan secara konsisten, sekolah dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas tingkah laku siswa.¹⁶

¹⁶Lihat di

B. Tinjauan Tentang Karakter Siswa

1. Pengertian siswa

Siswa/Siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan social, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif/pedagogis.¹⁷

- a. Pendekatan sosial, siswa adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, dia berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. siswa perlu disiapkan agar pada waktunya mampu melaksanakan perannya dalam dunia kerja dan dapat menyesuaikan diri dari masyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan di dalam lingkungan masyarakat sekolah. Dalam konteks inilah, siswa melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai social yang terbaik dapat

<http://tarmizi.wordpress.com/2008/12/12/antara-hukuman-dan-disiplin-sekolah>. Diakses 21 Mei 2013, pukul 20:10.

¹⁷Lihat di

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik. Diakses 26 Mei 2013, pukul 19:00.

ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran dan pengalaman langsung.

- b. Pendekatan Psikologis, siswa adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. siswa memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti: bakat, minat, kebutuhan, social-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah. Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh menjadi manusia seutuhnya. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelegensi, sosial, emosional, spiritual, yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
- c. Pendekatan edukatif/paedagogis, pendekatan pendidikan menempatkan siswa sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.¹⁸

2. Pengertian karakter siswa

¹⁸Lihat di <http://www.rpp-silabus.com/2012/06/pengertian-siswa-dan-istilahnya.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2013 pada pukul 19:15.

Ada yang berpendapat jika akar kata “karakter” ini berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu *kharakter, kharassein, dan kharax* yang bermakna *tools for making, to engrave* dan *pointed stake*. Dalam bahasa Indonesia kata-kata di atas berubah menjadi karakter¹⁹

Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti menandai, yaitu menandai tindakan atau tingkah laku seseorang. Kemudian istilah tersebut banyak digunakan dalam bahasa Prancis “*caratere*” pada abad ke-14 dan kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi “*character*”. Yang akhirnya menjadi karakter.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia²⁰, karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sementara dalam kamus psikologi²¹ karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya memiliki kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.

Suyanto dan Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan Negara.²²

¹⁹ Agus Wibowo, *Manajemen Karakter, Ibid.* h.8.

²⁰ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1997), h.281.

²¹ Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung : Tonis, 1982), h.29.

²² Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.70.

Maka dapat disimpulkan bahwa karakter siswa adalah cara berpikir atau kepribadian yang khas yang dimiliki oleh siswa, sehingga membentuk dirinya sendiri ditinjau dari aspek titik etis atau moral.

3. Tujuan pendidikan karakter

Pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan pentingnya diselenggarakan pendidikan karakter disemua pendidikan formal, presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan sedikitnya ada lima hal dasar yang menjadi tujuan dari perlunya menyelenggarakan pendidikan karakter sebagai berikut :

- a Membentuk manusia Indonesia yang bermoral.
- b Membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional.
- c Membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan bekerja keras.
- d Membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri.
- e Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot.²³

Adapun tujuan pendidikan karakter bangsa adalah Menurut Kemendiknas tahun 2010 adalah:

²³ Nurla Isna Aunillah, *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta : Laksana, 2011), h. 97-104.

- a Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- b Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
- c Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
- d Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
- e Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).²⁴

Tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah adalah sebagai berikut :

- a Memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.

²⁴ Lihat di <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/04/tujuan-pendidikan-karakter-bangsa.html>. Diakses 27 Mei 2012

- b Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
- c Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.²⁵

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.²⁶

Tujuan pendidikan karakter dapat dicapai jika pendidikan karakter dilakukan secara benar dan menggunakan media yang tepat. Pendidikan karakter dilakukan setidaknya melalui berbagai media diantaranya mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha dan media masa. Hal ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya pendidikan karakter bukan semata-mata tugas sekolah, melainkan tugas dari semua institusi yang ada.

4. Landasan dasar pendidikan karakter

a. Dasar Filosofi

²⁵ Dharma Kusuma, *Pendidikan Karakter*, (Bandung : Rosida, 2013), h.9.

²⁶ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), h.9.

Dasar filosofi akan adanya pendidikan karakter adalah Pancasila. Sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh Soedarsono, yakni pancasila harus menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, tujuan yang akan dicapai, perjanjian luhur bangsa, asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta jati diri bangsa.²⁷

Karakter yang berlandaskan falsafah pancasila maknanya adalah setiap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila pancasila secara utuh dan komprehensif.

1) Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa

Bentuk kesadaran dan perilaku iman dan taqwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia.

2) Bangsa yang menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Karakter kemanusiaan tercermin dalam pengakuan atas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mengasihi, tenggang rasa, peduli, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan.

3) Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa

Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa, bangga

²⁷ Muchlas Samani, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.21.

sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia, cinta tanah air dan negara Indonesia yang ber-*Bhineka Tunggal Ika*.

- 4) Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Karakter bangsa yang demokratis tercermin dari sikap dan perilakunya yang senantiasa dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menghargai pendapat orang lain.

- 5) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan

Karakter berkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pendidikan karakter adalah sebagai berikut :

- 1). Undang – Undang Dasar 1945
- 2). Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3). Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4). Permendiknas No 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan

- 5). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
 - 6). Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - 7). Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014
 - 8). Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014²⁸
5. Prinsip pendidikan karakter

Di Indonesia, pendidikan karakter bangsa sebenarnya telah berlangsung lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar Dewantara sebagai Pahlawan Pendidikan Nasional memiliki pandangan tentang pendidikan karakter sebagai asas Taman Siswa 1922, dengan tujuh prinsip sebagai berikut :

- a Hak seseorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan terbitnya persatuan dalam kehidupan umum.
- b Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya.
- c Pendidikan harus selaras dengan kehidupan.
- d Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi kedalaman hidup.
- e Harus bekerja menurut kekuatan sendiri.

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Paduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h.41-42.

- f Perlu hidup dengan berdiri sendiri.
- g Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik.²⁹

Dalam praktiknya, Lickona dkk (2007) menemukan sebelas prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif. Kesebelas prinsip tersebut sebagai berikut :

- a Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik.
- b Definisikan ‘karakter’ secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan dan perilaku
- c Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan proaktif dalam pengembangan karakter.
- d Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian.
- e Beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral.
- f Buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter dan membantu siswa untuk berhasil.
- g Usahakan mendorong motivasi diri siswa.

²⁹ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.6.

- h Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa.
- i Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter.
- j Libatkan anggota dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
- k Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanasifestasikan karakter yang baik.³⁰

Dalam pendidikan karakter sangat penting dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Selain itu, sekolah harus mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai

³⁰ Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter, Menjawab tantangan Kritis Multidimensional*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.129.

tersebut di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.³¹

6. Tahapan dalam pendidikan karakter

Menurut Ary Ginanjar Agustian, pembangunan karakter tidaklah cukup hanya dimulai dan diakhiri dengan penetapan misi. Akan tetapi, hal ini perlu dilanjutkan dengan proses yang secara terus-menerus sepanjang hidup.³² Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik yaitu, *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral.

Dimensi yang tergolong dalam *moral knowing* untuk mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing* ³³*moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian dalam mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*).

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk

³¹Ibid., h.129-130.

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Paduan, Ibid.* h.85.

³³ Ibid., h.89-95.

sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran terhadap jati diri (*consience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap penderitaan orang lain (*emphathy*), cinta kepada kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). *Moral action* merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya.

Menurut M. Furqon Hidayatullah pendidikan karakter dibagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap penanaman adab, tahap penanaman tanggung jawab, tahap penanaman kepedulian, tahap penanaman kemandirian, dan tahap penanaman pentingnya bermasyarakat.

a. Tahap Penanaman Adab (Umur 5-6 Tahun)

Pada tahap ini merupakan fase penanaman kejujuran, pendidikan keimanan (*tauhid*), menghormati orang tua, teman sebaya, dan orang-orang yang lebih tua, serta diajarkan tentang pentingnya proses, baik dalam belajar maupun mendapatkan sesuatu.

b. Tahap Penanaman Tanggung Jawab (Umur 7-8 Tahun)

Tanggung jawab merupakan perwujudan dari niat dan tekad untuk melakukan tugas yang diemban.

c. Tahap Penanaman Kepedulian (Umur 9-10 Tahun)

Kepedulian adalah empati kepada orang lain yang diwujudkan dalam bentuk memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan.

Tahap penanaman kepedulian pada masa kecil akan menjadi pondasi kokoh dalam membentuk kemampuan kolaborasi, sinergi, dan kooperasi. Hal ini merupakan langkah awal dalam membangun kesalehan sosial.

d. Tahap Penanaman Kemandirian (Umur 11-12 Tahun)

Nilai dalam kemandirian adalah tidak menggantung pada orang lain, percaya akan kemampuan diri sendiri, tidak merepotkan dan merugikan orang lain, berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dengan semangat bekerja dan mengembangkan diri. Menumbuhkan kemandirian dalam diri anak didik bisa dilakukan dengan melatih mereka bekerja dan menghargai waktu, melatih untuk menabung dan tidak menghabiskan uang seketika.

e. Tahap Penanaman Pentingnya Bermasyarakat (Umur 13 tahun ke atas)

Pada tahap ini, anak diajari bergaul dan berteman dengan anak-anak yang mempunyai karakter baik, seperti disiplin, menghargai waktu, kreatif, dan mencintai pengetahuan. Anak dilatih untuk selektif dalam mencari teman agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Menurut Solikhin Abu Izzuddin, keterampilan sosial merupakan aset sukses kepemimpinan dan mempengaruhi orang lain (kemampuan menebar pengaruh, berkomunikasi, memimpin, katalisator perubahan, dan

mengelola konflik, mendayagunakan jaringan, kolaborasi, kooperasi serta kerja tim).

C. Tinjauan Tentang Pengaruh Peraturan Sekolah Terhadap Karakter Siswa

1. Hubungan peraturan sekolah dengan pembentukan karakter siswa

Pendidikan Karakter merupakan sistem pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai-nilai dan karakter serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Sekolah berasrama (boarding school) memiliki kelebihan dalam menerapkan pendidikan karakter. Dengan program boarding school implementasi pendidikan karakter lebih terpantau karena semua kegiatan siswa telah terjadwal dan terpantau 24 jam. Sistem boarding school juga menekankan pada pendidikan kemandirian. Aplikasi pembelajaran lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, metodologi pendidikan karakter berupa keteladanan dan pengajaran akan lebih terarah dan efektif. Implementasi pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di asrama saja, namun juga terjadi sinkronisasi antara pendidikan di asrama dan kegiatan di sekolah.³⁴

Kehidupan di sekolah berlangsung dalam satu pola yang sama, kegiatan berulang-ulang dan diatur dengan jadwal yang ketat. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembiasaan pendidikan karakter seluruh warga sekolah. Suasana sekolah yang berdisiplin tinggi akan berpengaruh besar

³⁴ Donie Koesoema A, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Grasindo, 2007), h.212.

terhadap kehidupan peserta didik terutama di lingkungan sekolah. Kehidupan berdisiplin tinggi harus dijalani secara konsisten oleh warga sekolah sebagai salah satu modal utama pengembangan karakter peserta didik. Lingkungan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan dan fisik suatu sekolah, akan turut menunjang pendidikan karakter.

Suasana kehidupan sekolah perlu dibangun bersama-sama oleh warga sekolah sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Kepala sekolah, pegawai sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat dapat memberikan sumbangan pengembangan karakter melalui sikap dan perilakunya di sekolah. Di antara warga sekolah, peranan kepala sekolah, seluruh guru, orang tua dan masyarakat sangat kuat pengaruhnya dalam pengembangan pendidikan karakter para peserta didik.

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan,

keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.

Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah. Ada 3 aspek tata hubungan yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa yaitu siswa, warga sekolah lainnya (Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi atau Pegawai Sekolah) dan orang tua siswa/masyarakat.³⁵

Jika ingin pendidikan karakter yang efektif dan utuh mesti menyertakan tiga basis desain dalam pemrogramannya. Pertama, desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. Relasi guru dengan siswa bukan monolog, melainkan dialog, sehingga siswa itu berkesempatan untuk mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya.

Kedua, desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter

³⁵ Lihat di <http://haryonoadipurnomo.wordpress.com/2012/01/11/strategi-habitiasi-dalam-implementasi-nilai-nilai-pendidikan-karakter-bangsa-di-sekolah>, diakses Kamis 4 Juli 2013.

anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa. Pesan moral mesti diperkuat dengan penciptaan kultur kejujuran melalui pembuatan tata peraturan sekolah yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran.

Ketiga, desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain pendidikan karakter ini dilaksanakan secara simultan dan sinergis. Tanpanya, pendidikan kita hanya akan bersifat parsial, tidak konsisten, dan tidak efektif.³⁶

2. Dampak peraturan sekolah terhadap pembentukan karakter

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³⁷ Artinya upaya manusia dalam mencapai kedewasaan hidup. Langveld bahkan menyebut pendidikan sebagai pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih

³⁶ Mansur Muslich, *Pendidikan Karakter. Ibid. h.183.*

³⁷ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1989), h.19.

membutuhkan³⁸ Dengan kata lain pendidikan berfungsi untuk pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian seseorang, termasuk di dalamnya karakter seorang anak.

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Salah satu kebijakan sekolah disektor pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang berkarakter anak didik adalah diberlakunya tata tertib sekolah. Sebagai wujud demokratisasi dalam dunia pendidikan, maka tata tertib sekolah tidak dapat ditentukan oleh kepala sekolah sendiri, atau

³⁸ Sutari, Imam Barnadib, *Pengantar Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1984), h.25.

bahkan oleh dinas pendidikan semata-mata. Tata tertib sekolah pada hakikatnya dibuat dari, oleh, dan untuk warga sekolah. Kalaupun konsep tata tertib itu telah dibuat oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan, maka konsep itu harus mendapatkan persetujuan dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Komite Sekolah akan lebih baik jika dimintai pendapatnya tentang tata tertib sekolah tersebut. Guru dan siswa harus dimintai pendapatnya tentang tata tertib tersebut. Orangtua pun harus memperoleh penjelasan secara terbuka tentang tata tertib sekolah itu.

Tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi: nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Tata tertib sekolah lahir sebagai rambu-rambu bagi warga sekolah dalam bersikap, bertingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib lebih merupakan petunjuk agar warga sekolah dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik, bekerja secara tertib, tidak mengganggu kepentingan orang lain, dan berlaku santun. Tata tertib akan lebih membuat rasa senang seseorang jika dibuat tidak dalam kalimat negatif atau menggunakan kata-kata tidak. Oleh karena itu, menurut

Sulaiman³⁹ sangat perlu adanya sejumlah kriteria untuk siswa sebagai subyek dan sejumlah agenda dengan pola yang sistematis. Dengan demikian, maka menurut hemat penulis anak akan dapat melihat tata tertib sebagai perangkat aturan yang akan ikut dalam pembentukan karakter dirinya.

Tata tertib sekolah berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan serta membentuk karakter anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan. Oleh karena itu, menurut Dimas, anak harus dilibatkan dalam pembuatan tata tertib sehingga ia mendapatkan motivasi untuk terlibat dalam membuat aturan tentang perilakunya atau aturan untuk meluruskan perilakunya.

Dampak positif yang muncul dengan adanya tata tertib sekolah akan membuat siswa menjadi patuh pada peraturan sekolah atau guru, introspeksi dan berjanji tidak akan melanggar peraturan lagi, menjaga ketertiban sekolah, dan membantu mendisiplinkan siswa. Konteks inilah yang akan membuat peserta didik bertutur sapa secara sopan, peduli antar sesama, meminimalisir adanya sifat acuh pada peringatan sekolah atau guru, selalu mengulang kesalahan yang sama, tidak mentaati peraturan sekolah dan lain sebagainya.

³⁹Ali Sulaiman, *Anak Berbakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.22.